

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penilitiandari pembahasan mengenai respon Difabel terhadap ruang partisipasi yang dibangun oleh KPU Kota Yogyakarta pada Pemilu Presiden tahun 2014 dan partisipasi Difabel pada Pemilu Presiden di Kota Yogyakarta pada tahun 2014 dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. KPU Kota Yogyakarta merupakan salah satu KPU yang cukup berhasil dalam rangka memfasilitasi penyandang Difabel dalam pemilu tahun 2014. Hal tersebut terbukti dengan diperolehnya penghargaan dari KPU RI terkait fasilitasi penyandang Difabel. Perbaikan dalam kebijakan Pemilu oleh KPU Kota Yogyakarta tidak terlepas dari respon Difabel yang mampu melihat banyaknya pelanggaran dalam pemilu yang dilakukan oleh petugas, sehingga mengakibatkan enggannya Difabel berpartisipasi saat pemilu. Perbaikan di KPU Kota Yogyakarta tidak terlepas dari peran aktif Difabel untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian di evaluasi bersama-sama pemangku kepentingan sehingga respon tersebut tidak berhenti sebagai kritik tetapi menjadi solusi yang mengarahkan KPU Kota Yogyakarta jauh lebih baik. Selain itu kesadaran dalam politik dan peran aktif Difabel dalam mengagregasikan kepentingnya dalam pemilu berdampak terhadap perbaikan fasilitasi saat pemilu bisa diwujudkan.

Penelitian ini menemukan bahwa kemampuan merespon ruang partisipasi yang dibangun oleh KPU Kota Yogyakarta dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dari Difabel. Adapun tingkat kesadaran itu dibagi menjadi 3 yaitu :

- a. Kesadaran Semi Intransitif, pada tahap ini dapat disimpulkan bahwa ketika Difabel belum memahami permasalahan yang ada dan tidak mengetahui hak-haknya mereka akan tunduk dengan keadaan walaupun sebenarnya terdapat permasalahan-permasalahan. Dalam tahapan ini difabel di kota Yogyakarta masih sangat tertutup dan enggan bersosialisasi sehingga tidak memperoleh informasi dan sosialisasi yang mengakibatkan mereka tidak menggunakan haknya sebagai warga Negara dalam pemilu.
- b. Kesadaran *Naïve Transitivity*, pada tahap ini menemukan dua fase. Fase pertama Difabel gerakan Difabel telah memahami apa permasalahan-permasalahan yang selama ini belum disuarakan. Permasalahan terbesar adalah tidak difasilitasinya Difabel saat pemilu, masih adanya diskriminasi dari masyarakat ataupun pemerintah sehingga pemilu masih jauh dari sistem yang inklusi. Pada Fase kedua, gerakan difabilitas (*difability movement*) semakin massif masuk ke ruang-ruang partisipasi politik. Bukan saja pada ruang partisipasi yang disediakan atau dikemas oleh negara, namun juga pada ruang-ruang alternatif yang dibuat sendiri oleh difabel. Pada ruang negara yang selama ini menutup pintu bagi difabel kini difabel masuk dan menunjukkan identitasnya sertamemengaruhi perubahan kebijakan.

- c. Kesadaran Kritis, pada pemilu presiden tahun 2014 tahapan Difabel di Kota Yogyakarta telah pada tingkat kesadaran kritis sehingga mereka telah mampu mengkritisi permasalahan-permasalahan yang ada terkait pemilu, Difabelpun telah membuka diri . Berkat kritis dan massifnya gerakan Difabel mengakibatkan semakin baiknya pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta. Perbaikan itu seperti adanya alat bantu mencoblos, TPS yang aksesibel, leaflet untuk penyelenggara pemilu, video simulasi pemungutan suara untuk penyandang tuna rungu.
2. Partisipasi politik penyandang disabilitas pada pemilu tahun 2014 di Kota Yogyakarta terbagi menjadi dua. *Pertama* partisipasi sebelum pemilu atau pra pemilihan. Adapun kegiatan tersebut berupa menjadi relawan demokrasi dan melakukan lobbying kepada tim sukses kedua kandidat calon presiden. Difabel di Kota Yogyakarta juga melakukan *lobby* dalam rangka kontrak politik. Pertemuan ini adalah pertemuan untuk mendiskusikan kepentingan masyarakat difabel Indonesia dengan capres-cawapres. Dalam pertemuan ini didialogkan sejumlah isu-isu penting bersama kedua calon presiden dan calon wakil presiden RI 2014 - 2019. Pertemuan ini membahas sejumlah masukan penting yang tertuang dalam kontrak politik. Dengan melakukan *lobby* dengan pihak Tim sukses Capres dan Cawapres pada masa kampanye mampu mempengaruhi keputusan-keputusan yang akan dibuat Capres dan Cawapres dikemudian hari. *Kedua* partisipasi saat pemilihan, yaitu sebagai *voters* atau penyumbang suara dan menjadi penyelenggara pemilu yaitu petugas TPS. Partisipasi Difabel mencapai angka 66,5% , artinya

partisipasi Difabel di Kota Yogyakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi di wilayah lain, seperti data yang dirilis oleh Bandung *Trust Advisory Group (D-Trust)* untuk angka partisipasi penyandang disabilitas di Jawa Barat hanya mencapai 53,7%. Walaupun angka partisipasi masyarakat secara umum pada pemilu menurun dari tahun ke tahun tetapi pada pemilu tahun 2014 merupakan tonggak sejarah partisipasi Difabel dalam pemilu khususnya Difabel di kota Yogyakarta. Pada pemilu tahun 2014 Difabel di Kota Yogyakarta tidak hanya menjadi *voters* atau penyumbang suara untuk salah satu kandidat saat pemilu akan tetapi perannya lebih jauh dan bermakna daripada itu.

## **4.2 Saran**

### **1.2.1. Untuk Komisi Pemilihan Umum**

1. KPU Kota Yogyakarta harus melakukan pendataan ulang terkait jumlah penyandang Difabel yang mempunyai hak pilih dengan melibatkan perangkat Dusun seperti RT/RW sehingga semua penyandang dapat terdata.
2. Instrumen Pendataan memasukkan kategori jenis hambatan sosial/lingkungan eksternal. Misalnya difabel penglihatan memiliki hambatan dalam mengakses informasi berbasis cetak, untuk itu dibutuhkan model braile maupun audio dan teks bersuara.

3. Pihak Penyelenggara pemilu memperluas perspektif disabilitas dan membangun kerjasama dengan organisasi difabel demi memperoleh masukan soal Etika Disabilitas dan Prinsip Universal dalam layanan publik (khususnya pemilu) dan menuangkan pengetahuan tersebut ke dalam suatu Panduan Pelaksanaan Pemilu Aksesibile dan memastikan Petugas Pemilu diberbagai tingkatan memahami isi panduan dan menerapkannya.
4. TPS didesain dengan menggunakan prinsip Desain Pemilu Universal yang mempertimbangkan aksesibilitas pada saat pemilih difabel datang ke TPS, menggunakan hak pilihnya, sampai pada meninggalkan lokasi TPS. Misalnya, lokasi TPS tidak bertangga-tangga, tidak berumput tebal dan tidak melalui got pemisah, tempat yang rata, tidak di lantai dua.

#### **4.2.2. Untuk SIGAB**

1. Lebih banyak memberikan pendidikan politik agar semakin banyak pegiat komunitas Difabel yang tergabung dalam proses pembuatan kebijakan sehingga kebutuhan Difabel di Kota Yogyakarta Khususnya akan terakomodasi.
2. Lebih menanamkan kepercayaan diri kepada masyarakat Difabel yang tidak tergabung dalam OPD agar mempunyai keberanian untuk bersuara ketika tidak mendapatkan fasilitas dengan baik.

